

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program *E – Government*

E-government secara singkat merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk sektor publik agar menjadi lebih baik. Kemudian, sejumlah lembaga internasional telah mengemukakan penjelasan mengenai e-government, diantaranya ialah *World Bank* yang mengatakan bahwa E-government merupakan: ‘... *The use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*⁷

Definisi yang dikemukakan *World Bank* menjelaskan bahwa E-government merupakan penggunaan teknologi dan informasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan hubungan yang lebih efektif antara masyarakat, sektor bisnis dan pemerintah. Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep E-government bagi suatu negara antara lain⁸ :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

⁷ Paul G. Nixon dan Vassiliki N. Koutrakou, *E-government In Europe*, (USA: Routledge, 2007) Hal. Xix

⁸ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002) hal 27.

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk aktivitas keperluan sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government menjelaskan bahwa pengembangan e- government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.⁹ Melalui pengembangan *E-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan

⁹ Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.

pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan *E-government* di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan *E-government* secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup :

1. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;
2. Kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;
3. Kondisi kegiatan layanan saat ini;
4. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam mengikuti perkembangan di masyarakat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan reformasi birokrasi. Mengacu pada Perbub Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 Visi utama dari Reformasi Birokrasi nasional adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia,” Untuk mencapai visi utama tersebut, Reformasi Birokrasi bagi setiap aparatur sipil negara dan Instansi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi kebutuhan. Dengan demikian, Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di Pusat maupun di Daerah

¹⁰ Pergub Nomor 44 Tahun 2015 Road map reformasi birokrasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur

agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;

2. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional; penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹¹;
4. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumberdaya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya; peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik; peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; penguatan aksi antikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); peningkatan akses informasi publik yang akurat dan “up to date”; peningkatan koordinasi, integrasi dan

¹¹ *Ibid.*

sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD; peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan; optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah secara terpadu; peningkatan pengelolaan arsip Pemerintah Daerah secara profesional yang didukung system kearsipan yang komprehensif; mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsif, transparan dan akuntabel; menciptakan sinergitas antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana; peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam; pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang dititipkan melalui dana Belanja Tidak Terduga (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur) dan pencairannya melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Status Keadaan Darurat Bencana.

B. Tinjauan Umum Tentang Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat

1. Pengertian Media Interaktif

Media interaktif adalah integrasi dari media digital termasuk kombinasi teks elektronik, grafik, gambar bergerak, dan suara, menjadi terstruktur system komputer digital yang memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan data untuk keperluan yang sesuai. digital dapat mencakup Internet, telekomunikasi dan digital interaktif. konsep yang harus di tekankan dalam media interaktif adalah ‘Saluran pengiriman’ atau ‘platform’.¹² Media interaktif juga dapat diartikan sebagai cara orang memproses dan berbagi informasi, atau bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Media interaktif memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain - baik itu orang atau organisasi - menjadikan mereka peserta aktif dalam media yang mereka konsumsi.

Tujuan dari media interaktif adalah untuk melibatkan pengguna dan berinteraksi dengannya dengan cara yang tidak dilakukan oleh media non-interaktif. Bentuk media tradisional, seperti televisi dan radio, pada awalnya tidak memerlukan partisipasi aktif. Bentuk media ini membuat konsumen lebih pasif. Media-media tersebut tidak memiliki sarana untuk member saluran informasi dari konsumen ke penyedia layanan.

Tetapi dengan munculnya internet pada 1990-an, itu mulai berubah. Ketika teknologi berkembang, konsumen diberi alat yang berbeda melalui mana media interaktif disajikan. Akses ke internet beralih dari fasilitas yang

¹² Elaine England, *Interactive Media—What's that? Who's involved?* (Interactive Media UK, 2011) hal 2

dulu hanya tersedia melalui *dial-up* ke alat *nirkabel* yang dapat diakses dengan mudah dan praktis. Komputer dan laptop menjadi barang rumah tangga dan kebutuhan di tempat kerja, dan perangkat seluler mulai membuat media yang berinteraksi menjadi mudah dan nyaman.

2. Elemen Media Interaktif

Tidak seperti media tradisional, media interaktif dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk melakukannya, media interaktif akan membutuhkan unsur-unsur berikut¹³:

- a. Gambar dan grafik
- b. Animasi
- c. Teks Digital
- d. Video
- e. Audio

Seorang pengguna dapat berpartisipasi dengan menggunakan satu atau lebih elemen ini, unsur inilah yang tidak ditawarkan media tradisional.

3. Contoh Media Interaktif

Ada banyak jenis media di dunia modern, dan sebagian besar dapat dikategorikan "aktif," yang berarti bahwa pengguna terlibat secara langsung, atau "pasif," di mana pengguna hanyalah konsumen informasi. Tentu saja ada berbagai tingkat interaksi. Memilah-milah situs web untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tertentu biasanya jauh berbeda dari membuat

¹³ Glen Creeber, *Digital Cultures* (Open University Press, 2009) hal 11

keputusan real-time yang memaksa reaksi cepat dari pengguna lain dalam layanan virtual, misalnya, dan memposting dan mengomentari pembaruan dalam umpan media sosial masih membutuhkan jenis interaksi lain. Kesamaan dari semua ini adalah bahwa pengguna, dan orang yang menggunakan materi yang disajikan memiliki setidaknya beberapa orang mengatakan bagaimana hal-hal berkembang, dan membentuk hasilnya dengan cara yang terukur¹⁴.

1. Media Sosial

Media sosial bersifat interaktif hampir segala hal. Tidak hanya pengguna mempublikasikan informasi mereka sendiri, baik itu foto, pembaruan status, atau pikiran pendek, mereka juga sering meninggalkan komentar pada publikasi orang lain. Orang sering mengadakan seluruh percakapan dan membuat keputusan penting dalam ruang tertutup jaringan.

2. Aplikasi

Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, rePort) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dan lain-lain. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah *Microsoft Office* dan *OpenOffice.org*, Bahasa Pemrograman yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket

¹⁴ *Ibid* hal 20.

biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi

3. Situs web dan Internet

Sampai batas tertentu, seluruh Internet dapat dianggap “interaktif” karena memerlukan setidaknya beberapa keputusan terarah dari pengguna. Tidak seperti buku dengan konten tetap, situs web lebih tersebar dan informasinya dipadatkan dengan cara yang biasanya berubah dan diedit secara teratur. Jalan yang ditempuh peneliti untuk menemukan materi seringkali didorong oleh setidaknya sejumlah energi kreatif atau pengambilan keputusan di tempat sebagai hasilnya.

4. Video game

Media interaktif tidak hanya merujuk ke media yang berinteraksi dengan pengguna, tetapi juga media yang membuat pengguna berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, permainan video yang membutuhkan banyak pemain atau jejaring sosial adalah beberapa contoh terbaik. Permainan video membutuhkan tindakan aktif untuk bermain dan biasanya mendorong pengguna untuk membuat keputusan dan memanipulasi karakter permainan mereka, kadang-kadang disebut "*avatar*". Demikian pula, simulasi interaktif memungkinkan individu untuk menggunakan komputer untuk menciptakan kembali situasi kehidupan nyata dan mempraktikkan perilaku yang realistis untuk skenario tersebut.

C. Tinjauan Tentang Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan system informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan computer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi tiga bidang serta satu Sekretariat dan dikepalai oleh kepala bidang dari setiap bidangnya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten trenggalek, maka Diskominfo Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Trenggalek. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat di Jl. KH. Wachid Hasyim No.5, Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.

1. Visi dan Misi

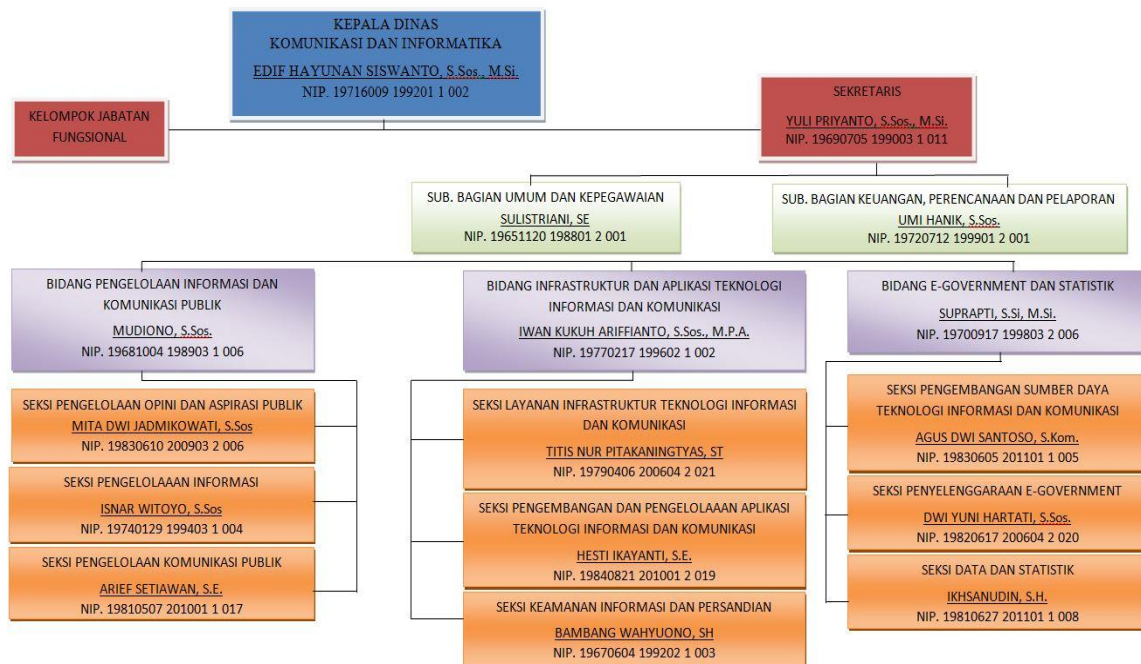
Visi¹⁵ : “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa”

Misi :

- a. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten, dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
- c. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- d. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- e. Meningkatkan sinergitas pembangunan Trenggalek dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;
- f. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;
- g. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

¹⁵ <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/> diakses pada tanggal 28 Januari 2020

2. Struktur Organisasi



3. Tugas dan Wewenang

a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas:¹⁶

- 1) menyusun program kerja Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 4) melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

¹⁶ Perbub Trenggalek nomor 24 tahun 2017 tentang penjabaran tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

- 5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas:

- 1) menyusun program kerja Bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
- 5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; dan

- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang *E-government* dan Statistik

- 1) Bidang *E-government* dan statistik mempunyai tugas:
- 2) menyusun program kerja Bidang *E-government* dan statistik sektoral sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang *E-government* dan statistik sektoral;
- 4) merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang *E-government* dan statistik sektoral;
- 5) melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang *E-government* dan statistik sektoral;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang *E-government* dan statistik sektoral;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang *E-government* dan statistik sektoral; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi,

fiqh merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁷

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

- a) Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b) Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
- c) Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.¹⁸

¹⁷ Ibnu Syarif *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), hal. 45.

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.¹⁹

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 30.

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter

Serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu²⁰:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu²¹ :

²⁰ *Ibid*, hal. 31

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. hal. 14.

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*).
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-„Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*).
Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Siyasah Idariyah

Siyāsah Idāriyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idāriyah merupakan maṣḍar (infinitif) dari kata adara asy- syay'a yudiruhu idārah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²² Adapun pengertian *idāriyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu: Dalam

²² Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah* (Bayt ats-Tsaqafah, Cetakan I: 2003), 7

Siyāṣah Idāriyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri.

Sebenarnya tidak ada satu ayat al-Qur'an yang dijumpai kata *al-Idarah*, namun apabila dicermati memang ada kata dalam al-Qur'an yang menyerupai yaitu kata tudirunaha *al-Mufahras*, di bawah kata *dawr* dan kata tadiru di dalam *al-Mu'jam* telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il* tsulatsi *dara'*.²³ Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata *dawr* dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada yang menyebut kata *idarah'*. Jadi hal ini menegaskan bahwa kata *idarah'* atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.

Alur kerja **Diwan** sama seperti definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *Diwan* sendiri terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- b. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- c. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

²³ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996) hal 2.

- d. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. selama memimpin masyarakat di Madinah.²⁴ Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Kekuasaan negara menurut fiqh siyasah terdiri dari al-Sulthah al-Tasyri'iyah (legislatif), al-Sulthah al-tanfidziyyah (eksekutif) dan al-sulthah al-Qadla'iyyah (kehakiman atau yudikatif). Pada awal sejarah ketatanegaraan umat Islam, ketiga bidang kekuasaan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi pada zaman modern masing-masing berdiri sendiri, namun bersifat pembidangan bukan pemisahan. Pemerintahan (kekuasaan tersebut) dipimpin oleh yang disebut Raja, Presiden, Perdana Menteri. Pemerintah dalam fiqh siyasah dikenal dengan sebutan khalifah, malik

²⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 238.

(raja), sultan, dan pada zaman modern banyak negara muslim yang kepala negaranya disebut presiden.²⁵

Dalam fiqh siyasah, asas-asas pemerintah yang baik selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat diperoleh pula dari sumber utama fiqh siyasah yakni al-Qur'an dan Hadits. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain asas amanah, asas tanggung jawab (*al-Mas-uliyah*), asas maslahat (*al-Mashlahah*), dan asas pengawasan (*al-Muhasabah*).²⁶

Pada perkembangannya penyempurnaan sistem yang dilakukan oleh para khalifah yang menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (*syari'at*).²⁷

Demi memenuhi urusan rakyat maka seorang khalifah memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (*Uslub Idari*) yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. Khalifah juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua

²⁵ Ibid, 88-89.

²⁶ Sulaiman at-Thamawi, *Ilm al-Idarah al-Amaah* (Cet. III Tahun 1965), hal. 21.

²⁷ Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hal. 264-265.

bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (*Nidzam Idari*), lalu mewajibkan seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena semua itu merupakan kegiatan-kegiatan substansi. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal tersebut menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, tidak dengan aturan yang lain. Maka pada saat itu, hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal ini merupakan kewajiban untuk mentaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh khalifah. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”. memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutia Nurcahyani Liputo dengan judul *“Penerapan E-government Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”* yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam mengukur efektivitas penerapan E-government kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Pakkukang Kota Makassar terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, sejauh ini sudah cukup memadai walaupun butuh sedikit tambahan sarana. Kesiapan Sumber Daya Manusia, aparat kelurahan sudah cukup tanggap dengan adanya program E-

governmentkelurahan yang berbasis IT ini.²⁸ Pembahasan program E-governmentyang ada dalam skripsi tersebut juga dibahas dalam penelitian ini. Namun penelitian yang dilakukan oleh Peneliti membahas tentang E-governmentsecara umum. Berbeda dengan yang di bahas dalam skripsi ini, meski masih dalam lingkup E-governmentpeneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat yang lebih spesifik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nataya Anindita dengan judul “*Elemen Sukses E – Government: Studi Kasus Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Kota Bandung*” yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Pada skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa program LAPOR! mampu menciptakan layanan pengaduan berbasis ICT yang lebih memudahkan masyarakat sebagai penggunanya. Keberhasilan program LAPOR! disebabkan oleh elemen – elemen yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara program LAPOR! serta masyarakat sebagai pengguna layanan itu sendiri.²⁹ Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) di kota bandung maupun layanan interaktif pemerintah dan masyarakat pada Diskominfo Kabupaten Trenggalek masih termasuk pada instrument program e-government. Namun masing-masing memiliki perbedaan dalam penerapan system pengoperasiannya. Layanan interaktif

²⁸ Siti Lupito *Skripsi* “Penerapan E-governmentKelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar 2015) hal. 77

²⁹ Nataya Anindita *Skripsi* “Elemen Sukses E – Government: Studi Kasus Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Kota Bandung” (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan 2015) hal. 160

bertujuan sebagai alat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sedangkan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat hanya memfasilitasi informasi dari rakyat ke pemerintahan

3. Skripsi yang ditulis oleh Risda Wulandari dengan judul “*Strategi Desiminasi Disnas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur.*” yang dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Strategi Diskominfo dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat adalah memperbaiki kualitas pelayanan, antara media dengan masyarakat.³⁰ Melakukan pendekatan komunikasi dengan mendatangi langsung orang-orang kepercayaannya setiap desa-desa agar tidak ada lagi masyarakat yang ketinggalan informasi tentang program pemerintahan. Baik penulis penelitian dalam skripsi ini maupun kripsi tersebut, keduanya memilih Diskominfo sebagai objek penelitian. Namun dari keduanya memiliki perbedaan dalam masalah yang di hendak di teliti. Yaitu meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas tentang layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.
4. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Wijaya dengan judul “*Penerapan E-government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-*

³⁰ Risda Wulandari *Skripsi* “Strategi Desiminasi Disnas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur.” (Makassar : UIN Alauddin Makassar 2015) hal. 102

government)” yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Tidak adanya perhatian dari pemerintah, berbagai keterbatasan baik dari sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi, maupun sumber daya manusia pengelola E-government/ pegawai masih sangat kurang.³¹ Skripsi tersebut juga membahas e-government, namun dalam penelitiannya peneliti memilih kesekretariatan daerah sebagai objek kajian yang berbeda dalam penelitian in yang memilih Diskominfo Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian.

5. Tesis yang ditulis oleh Sinta Nur Khabibah dengan judul “*E-government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Website BPS Provinsi D.I. Yogyakarta)*” yang dikeluarkan oleh Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pada tesis ini di jelaskan bahwa Pengembangan E-government di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta belum berhasil dengan baik, sehingga belum memberikan pelayanan yang baik. Belum berhasilnya pengembangan E-government BPS Provinsi D.I. Yogyakarta ditandai dengan : Setelah kurang lebih 16 (enam belas) tahun mengembangkan e-government, dan Perkembangannya baru sampai pada tahap pertama yaitu publikasi.³² Dalam tesis tersebut membahas tentang situs web yang juga termasuk dalam program e-government. Hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis

³¹ Aditya Wijaya *Skripsi* “Penerapan E-government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government)” (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2015) hal 94

³² Sinta Khabibah *tesis* “*E-government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Website BPS Provinsi D.I. Yogyakarta)*” (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013) hal. 193

skripsi ini adalah pemilihan objek kajian lain yaitu layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.